

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2014)

THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH AND ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE TO CAPITAL EXPENDITURE

(A Case Study on Local Government regencies/cities in West Java Province Period 2011 – 2014)

Eva Febrina¹, Sri Rahayu², Vaya Juliana Dillak³

^{1,2,3} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹evafebrina@students.telkomuniversity.ac.id, ²srirahayu@telkomuniversity.ac.id

³vayadillak@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat periode 2011-2014 melambat, tidak sejalan dengan belanja modal yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang belanja modal. Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2014 baik secara parsial maupun simultan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2011-2014. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 19 Kabupaten/Kota yang disertakan dengan kurun waktu 4 tahun sehingga diperoleh 76 sampel yang diproses. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* (REM).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal. Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian, maka Pemerintah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dalam bentuk PAD, dapat menurunkan tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah pusat dalam hal pendanaan. Pemerintah Pusat maupun daerah dapat menggunakan PAD dengan sebaik mungkin untuk alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal

Abstract

The rate of economic growth in regencies/cities in West Java province has been slowed in 2011-2014, and it is not in accordance with the capital expenditure that has increased every year. Related to the above, it is necessary to do research on capital expenditure. Another factor which influence the capital expenditure is the original local Government revenue.

This study aimed to determine the influence of economic growth and original local Government revenue (PAD) to capital expenditures in local Government regencies/ cities in West Java Province 2011-2014 either partially or simultaneously.

The population in this study is the reports on Local government budget of all local governments and regency in West Java during the period 2011-2014 by using purposive sampling and acquired 19 regency/city that were included with the period of 4 years in order to obtain 76 samples were processed. Methods of data analysis in this study is panel data regression methods Random Effect Model (REM).

The results showed that there is simultaneously a significant influence between economic growth, Original Local Governemnt Revenue of Capital Expenditure. Partially economic growth did not significantly influence capital expenditure, while original local Governemnt revenue significantly influence capital expenditure.

Based on the results of the study, the Government should optimize the potential of local revenues in the form of PAD, and should be able to reduce their dependence on central government funding. The Central and local governments are expected to use the PAD as well as possible.

Keywords: Economic Growth, Original Local Governemnt Revenue, Capital Expenditure

1. Pendahuluan

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Standar Akuntansi Pemerintahan PP RI No.71 tahun 2010)^[4].

Menurut Pujoalwanto (2014:87)^[6] Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (www.bi.go.id)^[17]. Menurut Tambunan (2011:250-254)^[9] jika ekonomi sedang lemah, yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDB yang menurun atau negatif, maka Pemerintah berkewajiban sesuai fungsinya memberi insentif atau dorongan agar pertumbuhan kembali positif atau meningkat, untuk tujuan tersebut, Pemerintah lewat kebijakan fiskal mempunyai dua opsi yakni menaikkan pengeluaran atau mengurangi tarif pajak pendapatan. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi terutama pada saat pertumbuhan dari investasi dan ekspor sedang lesu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka belanja modal juga mengalami kenaikan.

Namun terdapat fenomena yang terjadi di Jawa Barat, pada periode 2011 hingga 2014 yang tersaji dalam tabel 1 berikut

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Realisasi Belanja Modal Jawa Barat 2011-2014

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Realisasi Belanja Modal (%)
2011	6.48 %	74.54%
2012	6.21%	86.84%
2013	6.06%	106.73%
2014	5.07%	111.36%

Sumber: bappeda.jabarprov.go.id (diolah)

Pada tabel 1.2 menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat yang mengalami perlambatan dari tahun 2011 sampai 2014. Pada Tahun 2012 LPE melambat dibandingkan dengan tahun 2011 dari 6,48% menjadi 6,21%. Pada tahun 2013 melambat menjadi 6,06%. Lalu pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali mengalami perlambatan sebesar 5,07%. Sementara itu, di sisi lain pada periode 2011 hingga 2014 persentase realisasi belanja modal Jawa Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (<http://bappeda.jabarprov.go.id>)^[16]. Menurut BPS Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami peningkatan pos belanja sepanjang 2011-2014 berbeda-beda tergantung kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing karena kebutuhan pembangunan ini disesuaikan berdasarkan potensi wilayah, kegiatan produksi serta perkembangan masing-masing daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan PDRB tidak selalu diiringi oleh penurunan belanja modal. Dalam penelitian sebelumnya, Wertianti (2013)^[14] menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008)^[10] yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja modal.

Menurut PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Artinya Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan PAD dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah untuk mengalokasikan belanja modal. Namun terdapat permasalahan pada kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat pada periode penelitian yang tersaji dalam tabel 1.3 berikut ini

Tabel 2
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal (ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2011	5,868,899,656.73	6,020,287,635.27
2012	7,909,533,925.00	9,685,250,878.00
2013	10,200,597,602.00	11,710,021,513.00
2014	14,071,981,881.22	12,498,764,012.19

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2011 belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar Rp 6,020,287,635.27 lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 5,868,899,656.73. Hal yang sama terjadi pada tahun 2012 dimana belanja modal sebesar Rp 9,685,250,878.00 lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 7,909,533,925.00. Pada tahun 2013 pengeluaran belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat juga lebih besar yaitu Rp 11,710,021,513.00 dibandingkan PAD sebesar Rp 10,200,597,602.00 (www.bps.go.id).

Berdasarkan perbandingan PAD dengan belanja modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2013 belanja modal yang dikeluarkan lebih besar dari pada PAD yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa PAD tidak bisa menutupi belanja modal, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih kurang dalam menghasilkan PAD sehingga dibutuhkan pembiayaan lain berupa dana perimbangan.

Dalam penelitian sebelumnya, Sugiarti dkk (2014) dan Arwati (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, berbeda dengan Wandira (2012) yang menyatakan bahwa diperoleh pengaruh negatif antara PAD dengan belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji ulang dan melakukan penelitian dengan menggunakan regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* (REM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2014 baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2014)”

2. Dasar teori dan metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Pujialwanto (2014:87)^[6] pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus (Setyowati dan Suparwati, 2012)^[7]:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{(PDRB_{t-1})} \times 100\%$$

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004^[11] tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD dapat dirumuskan sebagai berikut (Setyowati dan Suparwati, 2012)^[7]:

$$PAD = \text{Hasil Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

2.1.3 Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010^[4], Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud.

Dengan demikian, Belanja Modal dapat dirumuskan sebagai berikut (Setyowati dan Suprwati, 2012)^[7]:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

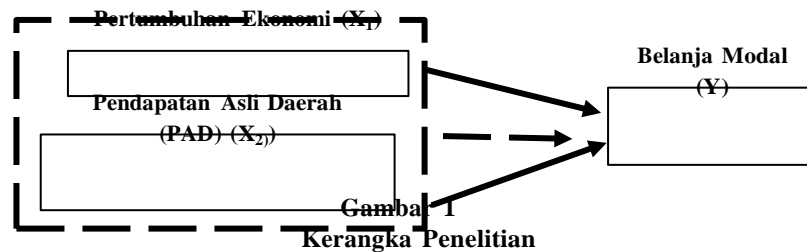
2.1.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Adanya otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Jaya,2014)^[2]. Oleh

karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan peningkatan pelayanan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (www.bi.go.id)^[17]. Jika PDRB suatu daerah meningkat maka Pemerintah Daerah seharusnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan asset berupa fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Pengadaan asset tersebut didapatkan dari belanja modal yang sudah di anggarkan setiap tahunnya. Dengan demikian, adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal yaitu jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka belanja modal juga mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Wertianti (2013)^[14] yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan pada belanja modal.

2.1.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali potensi daerahnya secara maksimal agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrasatruktur atau sarana prasarana daerahnya sendiri melalui belanja modal, karena PAD mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya (www.djpk.kemenkeu.go.id)^[19]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika PAD naik maka belanja modal juga akan mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiathi dkk (2014)^[8] dan Arwati (2013)^[11] yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.



Keterangan :
 —————> Berpengaruh secara parsial
 —————> Berpengaruh secara simultan

2.2 Metodologi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2014. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Seluruh Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2014.	27
2	Kabupaten dan Kota yang tidak konsisten mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran APBD selama periode 2011-2014	(8)
3	Total sampel pertahun	19
4	Tahun penelitian (2011-2014)	4
5	Jumlah sampel keseluruhan dalam penelitian	76

Sumber : *Data Sekunder yang telah diolah*

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 76 sampel yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dengan periode waktu penelitian 4 tahun.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yaitu data yang terdiri atas beberapa variabel seperti pada data seksi silang (*cross section*), namun juga memiliki unsur

waktu seperti pada data runtut waktu (*time series*) (Winarno, 2011:102)^[15]. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- α = Konstanta
- X1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- β_1 = Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi
- β_2 = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- ϵ = error term

3 Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	PE	PAD	BM
<i>Mean</i>	5.836053	19.29145	19.20605
<i>Maximum</i>	8.530000	21.09000	21.00000
<i>Minimum</i>	4.020000	16.93000	17.39000
<i>Std. Dev.</i>	0.901168	0.881878	0.789729
<i>Observations</i>	76	76	76

Sumber : Output *Eviews* 8.0 (Data diolah penulis, 2016)

Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 5.836053 dengan nilai standar deviasi 0.901168. Nilai maksimum dari pertumbuhan ekonomi sebesar 8.530000 dan nilai minimum sebesar 4.020000. Nilai rata-rata dari variabel PAD adalah 19.29145 dengan nilai standar deviasi 0.881878. Nilai maksimum dari PAD sebesar 21.09000 dan nilai minimum sebesar 16.93000. Nilai rata-rata dari variabel belanja modal adalah 19.20605 dengan nilai standar deviasi 0.789729. Nilai maksimum dari belanja modal sebesar 21.00000 dan nilai minimum sebesar 17.39000. Semua variabel mempunyai nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut mewakili populasi.

3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian metode yang telah dilakukan, maka metode yang digunakan dalam regresi data panel pada penelitian ini adalah metode *random effect*.

Tabel 5
Hasil Pengujian *Random Effect Model*

Dependent Variable: BM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/19/16 Time: 11:51
 Sample: 2011 2014
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 76
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.419540	2.190985	4.299226	0.0001
PE	0.006074	0.107749	0.056374	0.9552
PAD	0.505460	0.123275	4.100273	0.0001

Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.362730	0.3034
Idiosyncratic random			0.549624	0.6966
Weighted Statistics				
R-squared	0.220751	Mean dependent var		11.59816
Adjusted R-squared	0.199402	S.D. dependent var		0.614438
S.E. of regression	0.549776	Sum squared resid		22.06448
F-statistic	10.33999	Durbin-Watson stat		1.933230
Prob(F-statistic)	0.000111			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.333363	Mean dependent var		19.20605
Sum squared resid	31.18224	Durbin-Watson stat		1.452682

Sumber : Output Eviews 8.0 (Data diolah penulis, 2016)

Berdasarkan Tabel 4, dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat periode 2011-2014, yaitu:

$$BM = 9.419540 + 0.006074PE + 0.505460 PAD$$

3.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dari uji metode *random effect model* pada tabel 3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0.220751 atau 22.0751%. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 22.0751% sedangkan 77.9249% dijelaskan oleh variabel lain.

3.2.2 Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji f pada tabel 3 menunjukkan hasil bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,000111 < 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara simultan atau bersama-sama.

3.2.3 Pengujian secara Parsial (Uji t)

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil diketahui bahwa nilai tingkat probabilitas signifikansi PE sebesar 0.9552 lebih besar dari pada $\alpha = 0,05$, dan nilai koefisien regresi sebesar 0.006074 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara Parsial. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008)^[10] yang memiliki hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil diketahui bahwa nilai tingkat probabilitas signifikansi PAD sebesar 0.0001 lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$, dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.505460 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiharti dkk (2014)^[8] yang memiliki hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat periode 2011-2014. Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dengan terhadap belanja modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat periode 2011-2014.

Daftar Pustaka

- [1] Arwati, Dini & Hadiati, Novita (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*. ISBN: 979-26-0266-6
- [2] Jaya, I Putu & Dwirandra A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1* ISSN: 2302-8556
- [3] Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Penerimaan Daerah.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah.
- [6] Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia : Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [7] Setyowati, Lilis dan Suparwati Kus Yohana (2012) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi* Vol. 9 No. 1 - Juni 2012 ISSN 1411 - 1497
- [8] Sugiharti, Ni Putu & Supadmi, Ni Luh. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2*: 477-495/ ISSN : 2302-8556.
- [9] Tambunan, Tulus. 2011. *Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [10] Tuasikal, Askam. (2008). Pengaruh DAU,DAK,PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* vol.1, No.2 Hal .142-155.
- [11] Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [12] Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [13] Wandira, Arbie Gugus (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* ISSN 2252-6765.
- [14] Wertianti, G., & Dwirandra, A. A. N. B (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3* ISSN: 2302-8556.
- [15] Winarno, Wing Wahyu. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- [16] www.bappeda.jabarprov.go.id
- [17] www.bi.go.id
- [18] www.djpk.depkeu.go.id
- [19] www.djpk.kemenkeu.go.id